



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BEBEN ADNA BOKIM**
2. Jabatan : **KEPALA SUBAUDITORAT**
3. NHK : **470086**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.255.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 304 m2/34 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/45 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 137.000.000

1. MOBIL, HONDA SEDAN HONDA MOBILIO E Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA CBR 250 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 20.500.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 16.298.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 586.033.024**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.994.331.024

III. HUTANG Rp. 605.914.564**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.388.416.460

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.